



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRODUKTIVITAS DAN DISTRIBUSINYA UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN

¹Nur Yuliany, ²Roswiyanti, ³Andi Widiawati

¹UIN Alauddin Makassar, ²Universitas Cokroaminoto Makassar, ³ITB Nobel Indonesia Makassar
Email : nur.yuliany@uin-alauddin.ac.id, roswiyanti25@gmail.com, widiawati1972@gmail.com

Abstrak : Pengentasan kemiskinan adalah tujuan pembangunan utama setiap negara di dunia. Salah satu indikasi keberhasilan program penanggulangan kemiskinan adalah meningkatnya produktivitas masyarakat dari sudut pandang ini Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah penanggulangan kemiskinan dengan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi dan distribusinya terhadap masalah tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada 300 responden di Sulawesi Selatan. Analisis Partial Least Square (PLS) digunakan sebagai analisis data. Penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum regional berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan sedangkan kualitas sumber daya manusia dan kredit usaha rakyat tidak berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan. Studi ini juga menunjukkan bahwa upah minimum, kualitas sumber daya manusia, dan aksesibilitas finansial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas. Studi ini juga menunjukkan bahwa produktivitas berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian ini membuktikan bahwa produktivitas dapat menjadi variabel yang memediasi antara pinjaman usaha publik, kualitas sumber daya manusia dan upah minimum daerah terhadap pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: Upah, Aksesibilitas Keuangan, Sumber Daya, Produktivitas, Pengentasan Kemiskinan

Abstract : Poverty alleviation is the primary development goal of every country in the world. One indication of the success of the poverty alleviation program is increasing the productivity of the community from this point of view this study aims to analyze the problem of poverty alleviation by examining the influencing factors and its distribution on these problems. Data collection in this study was carried out by distributing questionnaires to 300 respondents in South Sulawesi. Partial Least Square (PLS) analysis was used as data analysis. This study indicates that regional minimum wage have a significant effect on poverty alleviation while human resource quality and people business loan have no effect on poverty alleviation. This study also indicates that minimum wage, human resource quality, and financial accessibility have a significant effect on productivity. This study also indicates that productivity significantly affects poverty alleviation. This research proves that productivity can be a variable that mediates between public business loan, quality of human resources and regional minimum wage to poverty alleviation Increasing productivity as a means of economic distribution is one method of poverty alleviation efforts.

Keywords: Wage, Financial Accessibility, Resources, Productivity, Poverty Alleviation

PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan telah menjadi permasalahan sejak lalu, melalui berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Bank dunia melaporkan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dengan pendapatan di bawah 1,9 US\$ per hari menunjukkan tren penurunan namun tren ini berhenti pada tahun 2020 ketika dunia dilanda wabah COVID-19. Banyak hal yang dapat mempengaruhi kemiskinan diantaranya terjadinya pandemi atau bencana alam, diantara faktor-faktor penyebab kemiskinan, faktor yang paling mudah dikaitkan dengan kemiskinan adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh penghasilan. Faktor ini sering dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan, Ketimpangan pendapatan adalah bagaimana pendapatan yang tidak merata didistribusikan ke seluruh populasi. Kualitas distribusi ekonomi sangat penting untuk menghindari ketimpangan sebagai prinsip distribusi.

Dalam ekonomi, distribusi adalah cara total output, pendapatan, atau kekayaan didistribusikan di antara individu atau di antara faktor-faktor produksi (seperti tenaga kerja, tanah, dan modal) (Samuelson, A. Paul dan Nordhaus, 2013). Semakin kurang merata distribusi, semakin tinggi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan sering disertai dengan ketimpangan kekayaan, yaitu distribusi kekayaan yang tidak merata. Populasi dapat dibagi dengan cara yang berbeda untuk menunjukkan tingkat dan bentuk ketimpangan pendapatan yang berbeda seperti ketimpangan pendapatan berdasarkan gender atau, ras juga kualitas pekerjaan Dalam pandangan ini, ketimpangan pendapatan akan sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Sehingga pemerintah melakukan upaya maksimal untuk menentukan penghasilan minimal dalam mengatasi masalah tersebut. Faktor kedua adalah kualitas sumber daya. Sumber daya, baik sumber daya alam yang dapat digali maupun sumber daya manusia yang ada di suatu negara, faktor ketiga adalah masalah permodalan yang masih menyisakan ketimpangan bagi masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan, ketiga faktor tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi produktivitas yang berdampak pada masalah kemiskinan.

Sifat kompleks dari masalah kemiskinan menuntut kebijakan dan strategi terpadu untuk mengatasinya. Program penanggulangan kemiskinan atau kebijakan yang berorientasi pada masalah kemiskinan telah diupayakan oleh banyak negara di dunia, seperti program kewirausahaan (Dominique Bonito et al., 2017),(Nursini, 2020). Di Indonesia, program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui *Kartu untuk Orang Miskin* dan Dana untuk Desa (Suryahadi & Al Izzati, 2018) dan juga melalui Program KUR. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia dinyatakan sebagai program percontohan (Olken, 2019) Sementara di banyak negara, telah diupayakan melalui pembangunan infrastruktur (Xiao et al., 2022). Para peneliti juga telah banyak melakukan penelitian tentang upaya penanggulangan kemiskinan yang dapat dijadikan referensi untuk masalah ini (Olken, 2019), (Wang & Ding, 2021), (Ngwakwe & Iqbal, 2021), (Bloeck et al., 2019). Begitu banyak penelitian dan diskusi tentang kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah serius yang akan menjadi perhatian, dan akan berlanjut untuk waktu yang lama.

Kemiskinan telah diekspresikan dan menjadi bahan perdebatan dan itu didefinisikan secara berbeda. Kemiskinan juga mencerminkan spektrum orientasi politik-ideologis yang menjadi ciri kebijakan dan berdampak pada pola dan prinsip perilaku ekonomi. Berbagai pendekatan telah diterapkan oleh para peneliti dan pemerhati kemiskinan di seluruh dunia untuk mengungkap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara di dunia. Dari laporan Care International saat ini, setidaknya ada 10 negara yang menghadapi kerentanan kemiskinan diantaranya Zambia, Malawi, Republik Afrika Tengah, Gualtemala, Columbia, Burundi, Nigeria, Zimabawe Honduras dan ada negara yang mengalami permasalahan yang membuat rakyatnya terancam kemiskinan yaitu Ukraina, di Asia Tenggara sendiri, sebagai akibat dari dampak COVID-19, telah mengakibatkan program pengentasan kemiskinan dihancurkan dan menciptakan kerentanan terhadap peningkatan indeks kemiskinan di wilayah ini.

Faktanya, masalah kemiskinan dihadapi oleh hampir setiap negara di dunia, bahkan di negara-negara Uni Eropa, Rusia, dan bahkan China sebagai kekuatan ekonomi dunia, masih mengalami masalah kemiskinan (Xiao et al., 2022). Pendekatan penelitian yang komprehensif termasuk pendekatan kuantitatif untuk mendefinisikan kemiskinan telah banyak diperdebatkan oleh beberapa peneliti yang tertarik dengan masalah ini (Bosco, 2019). Kemiskinan dari perspektif ekonomi dapat dilihat melalui : 1) Pada tingkat mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketimpangan dan ketimpangan pola kepemilikan sumber daya yang berujung pada distribusi pendapatan yang tidak merata (Cammeraat, 2020), (Kuznets, 1955). Rakyat miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan berkualitas rendah. (Kuypers et al., 2021). 2). Kemiskinan timbul karena perbedaan kualitas sumber daya manusia (Pestaria et al., 2022). Rendahnya kualitas sumber daya manusia menunjukkan produktivitas yang rendah, yang pada akhirnya berimplikasi pada rendahnya upah. Dengan demikian, perlu adanya peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (Ha & Huan, 2022). Rendahnya kualitas sumber daya manusia disebabkan oleh rendahnya pendidikan yang mengurangi daya saing (Febrina Harahap et al., 2022), tidak tepat, diskriminasi, dan keturunan. 3). Kemiskinan muncul karena perbedaan akses terhadap modal (Umar & Inaba, 2020). Perangkat kemiskinan adalah serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi sedemikian rupa sehingga menciptakan situasi di mana suatu negara akan tetap miskin dan akan terus mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu tujuan utama kebijakan publik yang dilakukan oleh masing-masing daerah dan nasional.

Kebijakan publik pemerintah penting dalam mengatasi kemiskinan, yaitu kebijakan fiskal atau penganggaran. Salah satu aspek kebijakan anggaran adalah aspek keberpihakan, yaitu berpihak pada setiap lapisan masyarakat, bahkan orang miskin. Penganggaran pemerintah yang pro-masyarakat miskin merupakan instrumen penting bagi pembuat kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dukungan pemerintah dalam bentuk bantuan juga diperlukan ketika masyarakat mengalami kejadian luar biasa (Hidayat et al., 2021). Banyak negara berusaha memberantas kemiskinan dan ketimpangan dengan berusaha memberikan kesempatan

kerja karena dengan bekerja dengan baik, masyarakat akan memiliki sumber pendapatan yang akan meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

Di negara-negara berkembang, masalah penyerapan tenaga kerja adalah masalah utama dalam pembangunan di dalam negeri di masa lalu maupun di masa depan. Ledakan populasi dari tahun ke tahun terus meningkat sementara tidak cukup dengan kesempatan kerja. Kelebihan pasokan pekerja tidak menimbulkan masalah bagi pembangunan ekonomi. Di sisi lain, ini adalah modal untuk mengumpulkan pendapatan, dengan asumsi bahwa pergerakan pekerja dari sektor subsistem ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan gerakan tidak akan meningkat secara berlebihan. Menurut Lewis, banyak pekerja akan mendorong lebih banyak tingkat produktivitas dan dengan demikian produktivitas kemudian akan dikonsumsi segera oleh masyarakat. Sementara Keynes berpendapat bahwa pada kenyataannya, pasar tenaga kerja tidak bekerja mengacu pada pandangan klasik. Dimanapun para pekerja memiliki semacam serikat pekerja (Labor Union) yang akan memperjuangkan kepentingan pekerja dari penurunan upah.

Untuk menciptakan lapangan kerja dan produktivitas yang lebih tinggi, pemerintah berupaya mendorong investasi, baik investasi domestik maupun investasi asing, (Nguyen, 2020), (Vera et al., 2022). Di tingkat negara, investasi lebih diarahkan pada perbaikan infrastruktur yang diharapkan dapat merangsang perekonomian sehingga dapat meningkatkan lapangan kerja, (Seidu et al., 2020). Investasi di bidang pendidikan juga tidak kalah penting untuk meningkatkan kapabilitas dan produktivitas sumber daya manusia (Djokoto, 2022).

Peningkatan produktivitas merupakan indikasi peningkatan kinerja ekonomi. Salah satu bentuk produktivitas yang paling penting adalah meningkatkan produktivitas sumber daya manusia sebagai aktor utama dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, upaya peningkatan produktivitas sumber daya manusia perlu diupayakan. Untuk itu, di Indonesia, beberapa program penanggulangan kemiskinan mendorong peningkatan produktivitas selain program kartu miskin dan pendanaan desa (Suryahadi & Al Izzati, 2018). Tiga poin utama di sini adalah penciptaan keseimbangan pendapatan dengan menetapkan upah minimum (Ximena V et al., 2015), meningkatkan aksesibilitas finansial melalui pinjaman usaha rakyat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama melalui program kewirausahaan (Nursini, 2020). Itu dibahas dalam penelitian saat ini.

TINJAUAN TEORI

A. Kemiskinan

Ketimpangan dalam perekonomian dianggap sebagai salah satu faktor utama penyebab kemiskinan (Kuznets, 1955), (Sánchez-Rodríguez et al., 2022). Dua masalah yang umum dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah dan tingginya tingkat kemiskinan atau jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan ekonomi atau inequality dalam distribusi pendapatan merupakan realita yang ada

di masyarakat baik di negara maju maupun berkembang dan masih menjadi isu penting untuk dikhawatirkan untuk diselesaikan. (Jansen & Wu, 2012), (Khan et al., 2016).

Penanganan kemiskinan secara umum dapat dilakukan melalui pembangunan yang dapat dilihat sebagai proses yang hasilnya bersifat multidimensi dan mencakup berbagai perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga pemerintah serta masyarakat. Selain terus mengejar percepatan pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan tetap harus menjadi fokus dalam melaksanakan pembangunan itu sendiri.

Masalah ketimpangan perlu menjadi fokus utama dalam menentukan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, kebijakan pembangunan akan sangat menentukan keberhasilan penanggulangan kemiskinan (Andrews, 2004). Dengan demikian, proses peningkatan kualitas kesejahteraan ekonomi penduduk diharapkan dapat diikuti dengan peningkatan kualitas penduduk secara keseluruhan. Salah satunya dapat dimulai dengan meningkatkan tingkat pemerataan pendapatan di antara berbagai kelompok ekonomi masyarakat (Champernowne, 1953). Jadi, pada dasarnya, pembangunan harus mencerminkan perubahan dalam masyarakat atau penyesuaian terhadap sistem sosial secara keseluruhan. Untuk itu, proses pembangunan tidak berjalan dengan sendirinya melainkan membutuhkan upaya konsisten dari berbagai pihak untuk memberikan kemakmuran sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat. Peran masyarakat yang terlibat dalam pembangunan harus diperluas sejalan dengan peningkatan kualitas hidup penduduk sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati secara luas.

B. Penanggulangan Kemiskinan melalui Regional Kebijakan Upah Minimum

Dickens, Machin, & Manning, (1999) menyatakan bahwa upah minimum akan menekan distribusi pendapatan secara signifikan tetapi memiliki efek negatif pada tenaga kerja karena harga telah meningkat sehingga pendapatan menjadi sangat minim pendapatan. Upah minimum adalah dilema bagi kehidupan pekerja sehingga lebih memberatkan orang miskin daripada membantu mereka (Lemos, 2008).

Sebelumnya (Sherk, 2007) Ditemukan bahwa tidak ada bukti nyata bahwa upah minimum dapat mengurangi kemiskinan. Itu bahkan tidak mengurangi tingkat kemiskinan di kalangan pekerja (Sabia et al., 2012). Doucouliagos & Stanley, (2009) Ditemukan bahwa setiap kenaikan upah minimum akan mengurangi pekerjaan dengan nilai yang sebanding, terutama untuk angkatan kerja sejak usia muda. Kemudian Schmitt, (2013) · Melalui penelitiannya ditemukan bahwa berkurangnya penyerapan tenaga kerja akibat upah minimum disebabkan oleh pekerja yang bekerja lebih keras dalam merespon upah minimum, sehingga menjadi saluran untuk mengurangi penggantian tenaga kerja. Dilain pihak (Sen, 1997) menyatakan bahwa jika pengangguran terjadi, tidak hanya akan dihadapkan pada masalah pendapatan yang rendah tetapi juga akan membebani negara, karena akan menghadapi output yang rendah dan anggaran yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan fiskal, dialihkan untuk membantu keluarga yang menganggur. (Sabia et al., 2012) menemukan hubungan yang lemah antara pendapatan rendah

dan kemiskinan dan hubungan di antara mereka menjadi lebih lemah dari waktu ke waktu. (Kartu & Krueger, 1994) menyatakan bahwa upah minimum gagal mengurangi kemiskinan di Amerika.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil jalan pembenaran pengenaan upah minimum dalam kondisi tertentu, meskipun, dalam berbagai studi empiris, upah minimum tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan (kuantitatif) secara umum. Para peneliti membenarkan upah minimum karena pekerja tidak memiliki informasi tentang ekspektasi harga, dan beberapa negara diatur dalam undang-undang. Di sisi lain, upah minimum dapat memberikan efek yang baik (menarik) bagi pekerja sehingga produktivitas pekerja meningkat. Upah minimum yang dikaji dalam penelitian ini adalah upah minimum daerah yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan karakteristik dan perkembangan ekonomi di daerah yang memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda. Dengan demikian, untuk menggambarkan kondisi upah yang tepat di satu daerah, perlu untuk melihat upah minimum regional yang ditetapkan di daerah itu.

Dalam konteks Indonesia, melimpahnya tenaga kerja menyebabkan murahnya peran pembayaran mereka. Kebutuhan kebutuhan kerja telah memaksa orang untuk bekerja dengan standar upah rendah yang kemudian membawa efek yang sangat besar pada kesejahteraan, yang sangat dekat dengan kemiskinan. Untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan tentang pentingnya upah minimum daerah sebagai upah yang layak dan hal ini telah membantu masyarakat untuk dapat menerima upah yang memenuhi standar hidup minimum. Besaran upah minimum selalu ditinjau ulang setiap tahun sejalan dengan tingkat inflasi dan bersamaan dengan itu pemerintah juga merevisi nilai standar upah minimum regional yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap tahunnya. Penerapan upah minimum regional ini telah mempengaruhi kesejahteraan pekerja dan dalam praktiknya akan membuat mereka lebih nyaman dan bahagia dengan diperolehnya standar upah minimum regional (Sukatrilaksana, 2003). Melalui argumen ini, Hipotesis 1 (H₁) Dari penelitian ini adalah: Upah Minimum Daerah mempengaruhi pengentasan kemiskinan

Seseorang akan bekerja dengan nyaman jika imbalan yang didapatnya atas pekerjaan tersebut mencukupi, dengan demikian upah yang diperoleh seseorang akan mempengaruhi hasil kerja dan produktivitasnya. Hal ini telah dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh (Ku, 2020). Dalam konteks Indonesia, penelitian dilakukan oleh (Del Carpio et al., 2015) juga membuktikan bahwa upah minimum regional yang diterapkan di Indonesia memberikan dampak terhadap produktivitas kerja. Terakhir, standar upah minimum regional yang dikelola dengan baik juga akan semakin meningkatkan produktivitas dan mengurangi pengangguran (Campos Vázquez et al., 2018) Berdasarkan argumen dan hasil penelitian sebelumnya, hipotesis 2 (H₂) Penelitian ini adalah : Upah Minimum Regional mempengaruhi Produktivitas.

Pendapatan gaji dengan standar minimum yang diterima oleh seorang karyawan tentu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimumnya, namun, seorang karyawan dapat meningkatkan pendapatannya beserta produktivitas yang mengarahkan pada pencapaian kinerja sehingga upah minimum yang diterimanya akan berpengaruh pada pengentasan kemiskinan jika diikuti dengan produktivitas Melalui argumen ini, Hipotesis 3 (H₃) dari penelitian ini

adalah: Upah Minimum Daerah mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan melalui Produktivitas.

C. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap kemiskinan

Pemikiran tentang kemiskinan berubah dari waktu ke waktu, tetapi pada dasarnya terkait dengan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan menunjukkan situasi kekurangan total yang terjadi bukan karena orang miskin menginginkannya, tetapi karena tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang mereka miliki (Allahdadi & Aref, 2011). Kemiskinan alam dan ekonomi timbul karena keterbatasan sumber daya alam, manusia dan lainnya sehingga peluang produksi relatif kecil dan tidak dapat berperan dalam pembangunan. Kemiskinan struktural dan sosial disebabkan oleh hasil pembangunan yang tidak merata, pengaturan kelembagaan, dan kebijakan dalam pembangunan. Sementara itu, kemiskinan budaya (cultural) disebabkan oleh sikap atau kebiasaan hidup merasa cukup yang menjebak seseorang dalam kemiskinan. Penyebab kemiskinan berasal dari dalam dan luar miskin. Penyebab internal termasuk rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu. Penyebab eksternal adalah sumber daya alam yang terbatas, pengaturan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, kesempatan kerja yang terbatas, dan persaingan yang meminggirkan orang miskin.

Jenis kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan pola waktunya, yaitu: (1) kemiskinan persisten; kemiskinan yang kronis atau turun-temurun, termasuk daerah yang kritis terhadap sumber daya alam atau terisolasi; (2) siklus kemiskinan; kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. (3) kemiskinan musiman; kemiskinan yang sering ditemukan pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan. (4) kemiskinan yang tidak disengaja; kemiskinan akibat bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Kemiskinan juga dapat dibedakan dengan membandingkan dengan ukuran tertentu atau dengan anggota/kelompok masyarakat lainnya. Ukuran kemiskinan absolut dengan menggunakan garis kemiskinan atau kondisi tertentu yang mencerminkan situasi kemiskinan. Sedangkan kemiskinan relatif diukur dengan membandingkan jumlah total kelompok dan dapat digambarkan melalui Kurva Lorentz dan menggunakan Rasio Gini untuk menentukan ukuran kesenjangan. Strategi penanggulangan kemiskinan yang diusulkan oleh Bank Dunia menyatakan bahwa setiap dekade strategi pengentasan kemiskinan telah berkembang dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, kesehatan, dan pendidikan, dan perlindungan hingga pemberdayaan masyarakat miskin.

Strategi untuk memerangi kemiskinan meliputi (1) strategi dalam jangka pendek, yaitu mentransfer sumber daya kepada masyarakat miskin dalam jumlah yang cukup. Perbaikan situasi kemiskinan dalam jangka pendek meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan peningkatan distribusinya; (2) Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya lokal. Peningkatan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi martabat hidup individu dan sosial dengan bermartabat.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut kemudian dituangkan dalam tiga program yang langsung disampaikan kepada masyarakat miskin, yaitu: (1) penyediaan kebutuhan dasar; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya usaha. Selain itu, masyarakat miskin memiliki strategi sendiri untuk menanggulangi kemiskinan. Strategi yang ditempuh adalah dengan meminjam dari lembaga informal, menambah jam kerja, anggota keluarga bekerja, bermigrasi, atau menabung.

Konsep kebijakan yang digunakan pemerintah dalam program penanggulangan kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan yang melandasinya. Tradisi perencanaan menurut John Friedmann setidaknya terdiri dari empat jenis, yaitu: (1) perencanaan sebagai reformasi sosial, di mana negara mempersiapkan dan merencanakan berbagai arah dan pedoman pembangunan untuk diikuti dan dilaksanakan oleh masyarakat; (2) perencanaan sebagai analisis kebijakan, bahwa pembuat kebijakan (pemerintah dan pihak terkait lainnya) berdasarkan analisis data ilmiah menyusun dan merencanakan berbagai arah dan pedoman pembangunan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat; (3) perencanaan sebagai pembelajaran sosial, bahwa pengetahuan perencanaan diperoleh melalui pengalaman dan disempurnakan melalui praktik (*learning by doing*), perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat dengan bimbingan dari para ahli; dan (4) perencanaan sebagai mobilisasi sosial, bahwa perencanaan pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat dan didorong oleh berbagai konsep/ideologi yang telah tertanam dalam jiwa dan budaya mereka, dari sekian banyak permasalahan sumber daya, hampir semuanya mengacu pada kualitas pelaku dan pengolah sumber daya tersebut. Oleh karena itu, masalah sumber daya dalam penelitian ini difokuskan pada masalah kualitas sumber daya manusia.

Faktor utama dalam masalah kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sikap individu. Sedangkan penyebab eksternal adalah keterbatasan sumber daya alam, pengaturan sosial dan kelembagaan dalam masyarakat, kebijakan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, dan persaingan yang meminggirkan masyarakat miskin. Untuk itu, sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, maka program penanggulangan kemiskinan akan dapat berjalan dengan baik (Allahdadi & Aref, 2011) Melalui argumen ini, Hipotesis 4 (H₄) Penelitian ini adalah : Kualitas Sumber Daya Manusia Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan.

Kualitas sumber daya manusia akan sangat mempengaruhi output dari suatu produk yang berarti peningkatan produktivitas. Kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi kemampuan kerja. Dan itu adalah sesuatu yang terkait erat dengan produktivitas, serta kualitas. Sumber daya alam, kualitas pengelolaan sumber daya alam seperti tanah dan air juga akan

sangat mempengaruhi produktivitas yang dapat dilihat dari kualitas output pengelolaan (Singh, 2022), (Muhamadiyevich & Akhmedjanovich, 2022). Melalui argumen ini, Hipotesis 5 (H₅) dari penelitian ini adalah): Kualitas Sumber Daya Manusia Mempengaruhi Produktivitas.

Kualitas sumber daya manusia akan sempurna jika diikuti dengan penggunaannya untuk meningkatkan produktivitas, dengan demikian kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi pengentasan kemiskinan jika kualitas sumber daya tersebut diikuti dengan produktivitas. Melalui argumen tersebut, Hipotesis 6 (H₆) dari penelitian ini adalah :Kualitas Sumber Daya Manusia Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Melalui Produktivitas

D. Pengentasan Kemiskinan melalui Pinjaman Usaha Orang

Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi kemiskinan adalah kurangnya akses keuangan bagi masyarakat miskin (Umar & Inaba, 2020). Kekurangan ini mempengaruhi ketidakmampuan masyarakat dalam berbisnis karena terhambat oleh permodalan, berangkat dari permasalahan tersebut pemerintah Indonesia memberikan terobosan dengan mengeluarkan kebijakan, khususnya bagi bank-bank BUMN untuk menyalurkan pinjaman yang khusus diperuntukkan bagi program kredit mikro yang disebut Pinjaman Bisnis Orang (KUR). Insentif keuangan, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan. Bukti dari Afrika Selatan menunjukkan bahwa dukungan pemerintah melalui bantuan keuangan telah terbukti mempengaruhi pengurangan tingkat kemiskinan di negara tersebut (Ngwakwe & Iqbal, 2021).

Dukungan keuangan melalui lembaga keuangan perbankan resmi membutuhkan landasan yang kuat, termasuk kemauan politik yang dituangkan dalam peraturan pemerintah agar program yang digagas dapat dilaksanakan dengan baik. Di Indonesia, program penyaluran kredit kepada rakyat didukung oleh Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pembangunan sektor riil dan pemberdayaan.

Pemberian pinjaman usaha rakyat di Indonesia dimaksudkan untuk memberikan dukungan modal bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Dukungan finansial ini diharapkan para pelaku UMKM yang selama ini kesulitan mengakses dukungan lembaga keuangan untuk menjalankan usahanya sesuai harapan. Dukungan finansial kepada para pelaku UMKM terbukti dapat memicu perekonomian lebih baik dan memimpin pelaku UMKM sebagai pemacu dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Ini terjadi di Provinsi Eastern Cape (Rungani & Potgieter, 2018).

Salah satu penyebab kemiskinan adalah sulitnya masyarakat miskin dalam mengakses jasa keuangan sehingga tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha yang produktif. Dengan demikian, diperlukan program pro rakyat miskin dengan memberikan pinjaman produktif dengan bunga rendah agar masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk mengelola modal yang cukup dalam usahanya. Menyediakan akses bagi usaha kecil dan menengah telah terbukti meningkatkan produktivitas yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Rungani & Potgieter, 2018). Lebih spesifik (Umar & Inaba, 2020) Terbukti bahwa bantuan dana oleh pemerintah dapat

meningkatkan produktivitas yang merupakan salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan. Melalui argumen ini, Hipotesis 7 (H₇) Dari penelitian ini adalah: Rakyat Pinjaman Bisnis (KUR). Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan.

Akses yang lebih baik ke sektor keuangan, terutama untuk pendanaan modal ventura, akan semakin meningkatkan produksi yang kemudian akan memberikan efek peningkatan output sebagai salah satu faktor yang diperhitungkan dalam meningkatkan produk domestik bruto. Dengan demikian, akses ke sektor keuangan akan dapat mempengaruhi peningkatan produktivitas. Koordinator Perekonomian Republik Indonesia menyatakan bahwa dukungan keuangan pemerintah melalui KUR telah mampu meningkatkan produktivitas UMK yang memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui argumen ini, Hipotesis 8 (H₈) dari penelitian ini adalah : Pinjaman Usaha Orang Mempengaruhi Produktivitas

Pinjaman yang diterima seseorang justru akan menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik, pinjaman akan bermanfaat jika dikelola dengan produktivitas yang baik, dengan demikian pinjaman akan berpengaruh pada kemiskinan jika diikuti dengan produktivitas. Fakta menunjukkan bahwa distribusi pinjaman usaha masyarakat banyak yang tidak tepat sasaran, hal ini dikarenakan penggunaan pinjaman yang tidak tepat atau bahkan pinjaman digunakan bukan untuk kegiatan produktif melainkan digunakan untuk konsumsi. Fakta lain menunjukkan bahwa jika pinjaman digunakan dengan benar, yaitu untuk tujuan produktif, ini akan meningkatkan ekonomi bagi peminjam. Dengan argumen ini, Hipotesis 9 (H₉) dari penelitian ini adalah: Kredit Usaha Orang Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan Melalui Produktivitas.

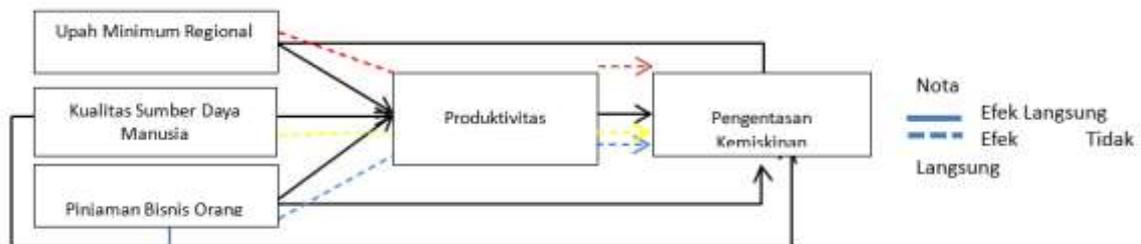
Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor, sehingga perlu diperhatikan faktor-faktor penting yang akan memberikan solusi dalam upaya pengentasan kemiskinan. Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal ini akan berdampak pada pendapatan yang merupakan salah satu faktor penting dalam mengentaskan kemiskinan. Peningkatan produktivitas akan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang memicu produktivitas itu sendiri, termasuk segala macam dukungan dalam memotivasi peningkatan produktivitas. Dalam konteks Indonesia, beberapa program telah dilakukan antara lain memastikan realisasi upah minimum untuk memenuhi kebutuhan minimum masyarakat, meningkatkan produktivitas melalui program pendampingan termasuk penyediaan kartu pra-kerja dan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan terakhir adalah dukungan pemerintah untuk aksesibilitas publik ke lembaga perbankan melalui Kredit Pengusaha Rakyat (KUR).

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) yang diluncurkan pada tahun 2015 memiliki visi untuk mengurangi setengah dari penduduk miskin dunia yang berpenghasilan kurang dari satu dolar per hari. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari pemenuhan tempat tinggal, sandang dan pangan (Yu et al., 2017) Penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui kegiatan produktif untuk mendukung upaya negara-negara berkembang dalam menghadapi tantangan ini. Pengentasan kemiskinan terbukti dipengaruhi oleh peningkatan produktivitas. Ini telah diteliti oleh (Ivanic & Martin, 2018), yang

membuktikan bahwa produktivitas berpengaruh pada pengentasan kemiskinan. Dengan argumen ini, Hipotesis 10 (H_{10}) dari penelitian ini adalah: Produktivitas Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan hipotesis yang telah disusun di atas, kerangka konseptual penelitian adalah

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei. Survei dilakukan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden melalui kuesioner yang disiapkan untuk mendapatkan tanggapan terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel dependen dari penelitian ini adalah pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu: upah minimum regional, kualitas sumber daya manusia, dan pinjaman usaha rakyat, menggunakan produktivitas sebagai variabel intervening.

Variabel-variabel ini didefinisikan dan diukur sesuai dengan indikator yang ditetapkan dengan memperhatikan sumber referensi utama yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana tergambar pada Tabel 1 yang menggambarkan pedoman struktur kuesioner penelitian sebagai berikut:

Tabel 1. Panduan Struktur Kuesioner Penelitian

Variabel	Kuesioner Item	Referensi Utama	
Upah Minimum Regional	Kesesuaian upah minimum dengan kebutuhan minimum	MW1	
	Kesesuaian Upah dengan standar kualitas hidup regional	MW2	(Campos et al, 2018)
	Kepuasan dengan upah minimum yang diterima	MW3	
Kualitas Sumber Daya Manusia	Akses ke pendidikan	RQ1	
	Kemampuan untuk bekerja	RQ2	

Variabel	Kuesioner Item	Referensi Utama
Pinjaman Bisnis Orang	Dukungan Finansial	FA1
	Dampak Dukungan Keuangan	FA2
	Monitoring dan Evaluasi	FA3
Produktivitas	Upaya Peningkatan Hasil	Hal 1
	Kesediaan untuk bergerak maju	Hal 2
	Kekuatan untuk berjuang	Hal 3
Pengentasan Kemiskinan	Mebutuhkan kepatuhan dengan perumahan	PA1
	Mebutuhkan kepatuhan dengan pakaian	PA2
	Mebutuhkan kepatuhan makanan	PA3
	Mebutuhkan kepatuhan dengan kesehatan	PA4
	Perlu kepatuhan dengan pendidikan	PA5

Sumber : Kuesioner penelitian, 2023

Sampel dalam penelitian ini adalah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan yang dikategorikan sebagai kelompok keluarga harapan yang tersebar di 4 wilayah utama di Sulawesi Selatan yang meliputi Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (MAMINASATA) yang dipilih melalui pertimbangan sebagai berikut (1) Penduduk yang bekerja dan memiliki gaji sesuai standar upah minimum (2) Warga yang menerima bantuan dari pemerintah dan/atau diberikan akses fasilitas kredit untuk Pinjaman Usaha Orang (3) warga yang memiliki salah satu kartu program pengentasan kemiskinan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KSKP)).

Mengingat populasi yang sangat besar, sampel dalam penelitian ini diambil secara proporsional, yaitu dengan memilih responden yang representatif untuk setiap wilayah dengan mengambil sampel sebanyak 75 famili per wilayah sehingga diperoleh 300 sampel untuk keempat wilayah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Secara demografis, sampel I penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Responden penelitian saat ini didominasi oleh 235 responden laki-laki atau 78%, dan mayoritas responden berusia antara hingga 40 tahun adalah 155 individu atau 52%. Rata-rata pengalaman kerja responden adalah sekitar 11 hingga 15 tahun. Demografi lengkap responden ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2. Demografi Responden

Atribut	Benda	F	%
Jenis kelamin	Pria	235	78%
	Perempuan	65	22%
Usia (Tahun)	30 – 35 tahun	48	16%
	36 – 40 tahun	97	32%
	>40 tahun	155	52%
Pengalaman Kerja	1 – 5 tahun	37	12%
	6 – 10 tahun	54	18%
	11 – 15 tahun	81	27%
	16 – 20 tahun	72	24%
	21 – 25 tahun	56	19%
Penghasilan Lainnya	Memiliki penghasilan lain	246	82%
	Tidak Ada Penghasilan Lain	54	18%

Sumber : Kuesioner Penelitian, 2023

Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah CFA (Confirmatory Factor Analysis) dan untuk pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan teknik Cronbach Alpha. Evaluasi validitas konstruk, perbandingan pola respons, dan perbandingan model yang bersaing adalah tiga aplikasi utama CFA dalam penelitian evaluasi psikometri (Alavi, Visentin, Thapa, Hunt, Watson, Cleary, 2020). Kriteria utama dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut: ketika koefisien Alpha kurang dari 0,60 itu menunjukkan tingkat keandalan yang rendah. Tetapi ketika koefisien Alpha lebih dari 0,60 atau mendekati 1,00, dapat dikatakan keandalan yang tinggi. Semua analisis data diproses oleh perangkat lunak smart partial least square (PLS) melalui dua tahap perhitungan. Yang pertama adalah analisis algoritma untuk mengukur kelayakan ukuran pada dimensi seperti; validitas dan reliabilitas (AVE, Cronbach alpha, dan Critical Ratio). Bagian kedua; Analisis bootstrapping digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh antar variabel yang diteliti dalam penelitian ini sehingga hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini dapat terjawab.

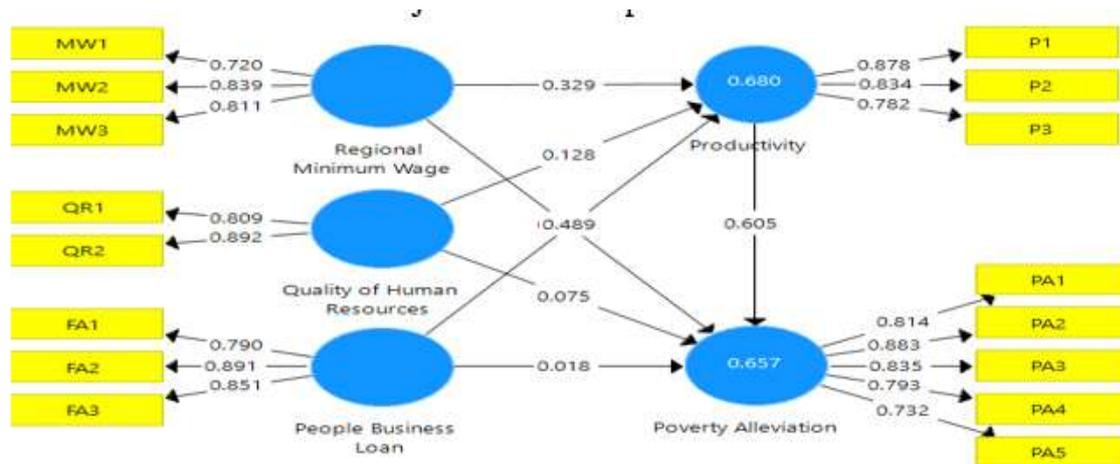
HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis data yang telah dilakukan dengan menggunakan software pintar PLS menghasilkan data awal yang digunakan sebagai analisis lanjutan dalam penelitian ini. Sebagaimana dinyatakan, data yang baik adalah data yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, yaitu pemenuhan standar loading factor dengan nilai (λ)>:0,5. Dari hasil

analisis algoritma yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa semua loading factor yang dihasilkan berada pada nilai di atas 0,5 sehingga yang menunjukkan kualitas data

Hasil lengkap analisis algoritma yang dihasilkan oleh Smart PLS dapat dilihat pada Gambar Analisis PLS sebagai berikut:

Gambar 2. Analisis PLS



HAT memenuhi kriteria dalam analisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Analisis selanjutnya adalah menentukan tingkat kesesuaian model yaitu dengan mengetahui nilai Validitas nilai AVE dan nilai untuk mengetahui reliabilitas data, dimana kriteria data yang baik adalah pemenuhan kriteria Validitas dengan nilai validitas standar diatas 0,7 sedangkan nilai AVE dengan standar diatas 0,5 maka untuk reliabilitas baik untuk reliabilitas komposit maupun nilai alfa Cronbach dengan nilai baku diatas 0,6 maka model good of fit untuk data penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3. Model Good of Fit

Variabel	Item	Validitas	AVE	Keandalan Komposit	Cronbach Alfa
Upah Minimum Regional	MW1	0,720	0,627	0,834	0,700
	MW2	0,839			
	MW3	0,811			
Kualitas Sumber Daya Manusia	QR1	0,879	0,840	0,655	0,626
	QR2	0,878			
Pinjaman Bisnis Orang	FA1	0,790	0,714	0,882	0,801
	FA2	0,891			

	FA3	0,851			
	Hal 1	0,878			
Produktivitas	Hal 2	0,834	0,693	0,871	0,777
	Hal 3	0,782			
	PA1	0,814			
	PA2	0,883			
Pengentasan Kemiskinan	PA3	0,835	0,661	0,971	0,871
	PA4	0,793			
	PA5	0,732			

Hasil pengujian hipotesis untuk masing-masing hubungan variabel laten yang disajikan pada Tabel 4 menunjukkan bahwa upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (sig. p-value $0,011 < 0,05$. berarti hipotesis H_1 =diterima). Upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas (sig. p-value $0,000 < 0,05$. berarti hipotesis H_2 =diterima). Upah minimum regional berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan melalui produktivitas (sig. p-value $0,000 < 0,05$ berarti hipotesis H_3 =diterima). Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (sig. p-value $0,181 > 0,05$ berarti hipotesis H_4 =ditolak). Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap produktivitas (sig. p-value $0,00 < 0,05$) berarti hipotesis H_5 =diterima). Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan melalui produktivitas (p-value $0,022 < 0,05$, berarti hipotesis H_6 =diterima). Kredit usaha rakyat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (p-value $0,760 > 0,05$, berarti hipotesis H_7 =ditolak).

Pinjaman usaha orang berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas (p-value $0,000 < 0,05$, berarti hipotesis H_8 =diterima). Kredit usaha rakyat berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan melalui produktivitas (sig. p-value $0,00 < 0,05$ berarti hipotesis H_9 = diterima). Dan hipotesis terakhir untuk efek langsung menunjukkan bahwa produktivitas berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan (sig. p-value $0,00 < 0,05$ berarti hipotesis H_{10} =diterima).

Tabel 4. Hasil hipotesis

	Rata-rata Sampel	Std.Deviasi	T Statistik	P.Nilai
Upah Minimum Daerah untuk Pengentasan Kemiskinan	0,185	0,047	3,965	0,000
Upah Minimum Regional untuk Produktivitas	0,329	0,039	8,399	0,000

Upah Minimum Daerah untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Produktivitas	0,199	0,032	6,154	0,000
Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengentasan Kemiskinan	0,075	0,056	1,340	0,181
Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Produktivitas	0,128	0,048	2,642	0,000
SDM Berkualitas untuk Peningkatan Kemiskinan Melalui Produktivitas	0,077	0,034	2,290	0,022
Pinjaman Usaha Rakyat untuk Pengentasan Kemiskinan	0,018	0,059	0,306	0,760
Pinjaman Bisnis Orang pada Produktivitas	0,489	0,037	13,072	0,000
Pinjaman Usaha Rakyat untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Produktivitas	0,296	0,036	8,316	0,000
Produktivitas dalam Pengentasan Kemiskinan	0,605	0,068	8,838	0,000

Kemiskinan di suatu negara dapat dikategorikan menjadi dua jenis kemiskinan, yaitu (1) Kemiskinan Sementara dan (2) Kemiskinan Kronis. Dalam perekonomian, hal ini bisa terjadi karena bencana alam, kondisi darurat, epidemi, perang dan sebagainya, seperti yang terjadi di Suriah, Yaman dan juga yang terjadi di Ukraina saat ini, sedangkan kemiskinan kronis adalah kemiskinan yang menimpa suatu negara karena potensi negara sejak awal, seperti kurangnya sumber daya alam, Lemahnya sumber daya manusia dan kesalahan dalam penyelenggaraan negara yang menyebabkan perekonomian tidak dikelola dengan baik dan menyebabkan masalah kemiskinan masif di dalam negeri, dalam mengatasi masalah tersebut tentu saja memerlukan pendekatan yang berbeda, kemiskinan sementara memerlukan upaya pemerintah Untuk membantu mengatasi situasi temporal dengan memobilisasi bantuan untuk melindungi keluarga dan kelompok masyarakat dalam konteks Indonesia, Penanganan masalah ini dilakukan dengan menyalurkan bantuan langsung tunai dan subsidi pada barang primer, bantuan tersebut bersifat sementara yang dapat dicabut ketika keadaan sudah membaik dan dapat diselesaikan.

Sedangkan penanganan kemiskinan kronis dilakukan dengan cara pemberdayaan terstruktur dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Strategi tersebut kemudian dituangkan dalam tiga program yang langsung disampaikan kepada masyarakat miskin, yaitu: (1) penyediaan kebutuhan dasar; 2) pengembangan sistem jaminan sosial; dan 3) pengembangan budaya bisnis ketiga program ini diarahkan pada peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan secara terukur diarahkan pada peningkatan produktivitas.

Penting untuk mengatasi kemiskinan apakah itu temporal atau kronis. Diperlukan pemberdayaan yang terintegrasi sebagai program nasional, tiga hal penting di Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kebutuhan keamanan dasar dari sisi pendapatan masyarakat pekerja

dengan mewajibkan perusahaan dan pemilik usaha untuk memberikan upah yang layak dan tidak boleh melanggar ketentuan upah minimum daerah, sementara dalam hal melindungi masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dalam Peningkatan kapabilitas sumber daya manusia dilakukan melalui program kewirausahaan dan juga layanan pendidikan di Indonesia, untuk hal ini didukung dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di bidang pendidikan formal, sedangkan untuk kegiatan non formal, berbagai program untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan didukung oleh kementerian termasuk program yang dicanangkan oleh kementerian pariwisata dan industri kreatif. Pemerintah juga telah mengeluarkan program pendanaan dan bantuan modal bagi masyarakat yang akan menjalankan usaha produktif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Semua program ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya diharapkan dapat mengentaskan kemiskinan.

Produktivitas adalah kunci dari masalah penanggulangan kemiskinan, setidaknya hal ini sudah terbukti di Indonesia. Dengan meningkatkan produktivitas, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya baik bagi mereka yang bekerja di perusahaan maupun mereka yang bekerja secara mandiri sebagai pengusaha. Produktivitas akan menjadi salah satu ukuran pencapaian kinerja. Seseorang yang memiliki produktivitas tinggi akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan apresiasi yang lebih baik. Jika dia seorang karyawan maka produktivitas akan memiliki efek linier pada imbalan yang mereka terima, jika mereka bekerja secara mandiri maka produktivitas akan ditunjukkan dari output produk mereka yang akan mempengaruhi pendapatan yang dapat mereka peroleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas mampu menjadi variabel mediasi untuk variabel kredit usaha rakyat, kualitas sumber daya manusia dan upah minimum daerah terhadap pengentasan kemiskinan, hasil perhitungan menunjukkan bahwa kredit usaha rakyat dan kualitas sumber daya manusia tidak secara langsung mempengaruhi pengentasan kemiskinan namun kedua variabel tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan jika dimediasi oleh produktivitas. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh (Ivanic & Martin, 2018), yang membuktikan bahwa produktivitas berpengaruh pada pengentasan kemiskinan.

Dengan asumsi di atas, produktivitas perlu dijadikan titik dan juga sebagai alat distribusi untuk pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas perlu diamati lebih intens dalam pendekatan komprehensif. Produktivitas bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri tetapi terjadi karena pemicu stimulusnya serta pengaruh lingkungan dan kondisi yang memotivasi stimulasi untuk memenuhi dan mengejar kebutuhan produktivitas. Salah satu pemicu produktivitas adalah harapan akan sesuatu yang diinginkan dalam konteks seseorang yang bekerja. Harapannya, upah sepadan dengan usaha yang telah dilakukan. Untuk itu, pemerintah berusaha serius mengelola gaji pekerjaan yang harus sudah memenuhi standar hidup minimum. Upaya ini dilakukan dengan menetapkan upah minimum regional. Namun, saat ini masih banyak perusahaan yang menetapkan upah minimum dari

pemerintah sebagai upah maksimal yang dapat diberikan oleh perusahaan, tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius untuk ditangani agar target pemberian upah minimum tidak salah pandang.

Produktivitas juga dipicu oleh kualitas sumber daya dalam melakukan kegiatan produktif. Kedua sumber daya tersebut berasal dari pelakunya, yaitu sumber daya manusia maupun sumber daya modal seperti sumber daya alam yang akan menjadi objek pengelolaan. Oleh karena itu kualitas output sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya dan hal ini menjadi hal yang sangat penting yang mempengaruhi produktivitas.

Produktivitas masyarakat, khususnya masyarakat usaha kecil dan menengah, juga sangat dipengaruhi oleh sulitnya akses permodalan yang disediakan oleh lembaga keuangan (perbankan). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat memberikan keseimbangan kepada masyarakat sehingga rakyat kecil pun memiliki akses ke lembaga keuangan untuk mengakses permodalan. Dalam konteks Indonesia, program yang tersedia perlu ditinjau secara seksama dan bertahap. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah dapat segera dilepaskan seiring dengan peningkatan produktivitas mereka sebagai bukti keberhasilan program yang dilaksanakan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa produktivitas merupakan salah satu alat untuk mendistribusikan program-program penanggulangan kemiskinan yang selama ini diupayakan oleh pemerintah. Melalui produktivitas, peningkatan produksi output menjadi kebutuhan yang dapat dicapai dan ini akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bukti pengentasan kemiskinan. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah peningkatan produktivitas harus dilakukan secara terstruktur dan memiliki efek berkelanjutan dalam jangka panjang sehingga produktivitas yang telah tercipta akan mampu melepaskan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah dan selanjutnya dapat menciptakan kemandirian ekonomi sebagaimana yang dicita-citakan pemerintah untuk membangun masyarakat yang sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Allahdadi, F., & Aref, A. (2011). Human resource development for poverty alleviation in Iran. *Life Science Journal*, 8(3), 63–66.
- Andrews, C. W. (2004). Anti-poverty policies in Brazil: Reviewing the past ten years. *International Review of Administrative Sciences*, 70(3), 477–488.
<https://doi.org/10.1177/0020852304046202>
- Bloeck, M. C., Galiani, S., & Weinschelbaum, F. (2019). Poverty alleviation strategies under informality : evidence for Latin America. *Latin American Economic Review*.
<https://doi.org/10.1186/s40503-019-0074-4>

- Bosco, B. (2017). One Size Does Not Fit All: Quantile Regression Estimates of Cross-Country Risk of Poverty and Social Exclusion in Europe. *SSRN Electronic Journal*, September. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3043482>
- Cammeraat, E. (2020). The relationship between different social expenditure schemes and poverty, inequality and economic growth. *International Social Security Review*, 73(2), 101–123. <https://doi.org/10.1111/issr.12236>
- Campos Vázquez, R. M., Esquivel, G., & Santillán Hernández, A. S. (2018). The impact of the minimum wage on income and employment in Mexico. *CEPAL Review*, 2017(122), 189–216. <https://doi.org/10.18356/d81adc80-en>
- Card, D., & Krueger, A. B. (1994). Minimum Wages and Employment : A Case Study of the Fast -Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. *The American Economic Review*, 84(4), 772–793. [https://doi.org/10.1016/s0015-6264\(64\)80155-3](https://doi.org/10.1016/s0015-6264(64)80155-3)
- Champernowne. (1953). aModelOfIncomeDistributionParetoZipf.pdf. *The Economic Journal*, 63(250), 318–351.
- Del Carpio, X., Nguyen, H., Pabon, L., & Wang, L. C. (2015). Do minimum wages affect employment? Evidence from the manufacturing sector in Indonesia. *IZA Journal of Labor and Development*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/s40175-015-0040-8>
- Dickens, R., Machin, S., & Manning, A. (1999). The effects of minimum wages on employment: Theory and evidence from Britain. *Journal of Labor Economics*, 17(1), 1–22. <https://doi.org/10.1086/209911>
- Djokoto, J. G. (2022). The investment development path and human development: Is there a nexus? *Research in Globalization*, 4, 100079. <https://doi.org/10.1016/j.resglo.2021.100079>
- Dominique Bonito, J. M., Joenes Daantos, F. A., Catherine Mateo, J. A., & Antoinette Rosete, M. L. (2017). Do Entrepreneurship and Economic Growth Affect Poverty, Income Inequality and Economic Development? *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(1), 33.
- Doucouliagos, H., & Stanley, T. D. (2009). Publication selection bias in minimum-wage research? A meta-regression analysis. *British Journal of Industrial Relations*, 47(2), 406–428. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8543.2009.00723.x>
- Febrina Harahap, E., Helmawati, H., Rahmi, S., Ramadhani, Z., & Mora, M. (2022). Economic Competitiveness and Quality of Human Resources in West Sumatra. *KnE Social Sciences*, 2022, 246–253. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i6.10627>
- Ha, N. T. T., & Huan, T. Van. (2022). Strengthening the Attraction of High-quality Human Resources in Vinh Phuc Province, Vietnam. *European Journal of Business and Management Research*, 7(2), 16–19. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2022.7.2.1305>

- Hidayat, M., Latief, F., Widiawati, A., Asbara, N. W., & Zaeni, N. (2021). Factors Supporting Business and its Distribution to Business Resilience In New Normal Era. *Journal of Distribution Science*, 19(11), 5–15. <https://doi.org/10.15722/jds.19.11.202111.5>
- Ivanic, M., & Martin, W. (2018). Sectoral Productivity Growth and Poverty Reduction: National and Global Impacts. *World Development*, 109, 429–439. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.07.004>
- Jansen, W., & Wu, X. (2012). Income inequality in urban China, 1978-2005. *Chinese Sociological Review*, 45(1), 3–27. <https://doi.org/10.2753/CSA2162-0555450101>
- Khan, S., Khan, S. A., & Tariq, M. (2016). The Analysis of Income Inequality and Economic Growth Relationship: Evidence from Pakistan's Data. *Global Economics Review*, 1(I), 24–35. [https://doi.org/10.31703/ger.2016\(i-i\).03](https://doi.org/10.31703/ger.2016(i-i).03)
- Ku, H. (2020). Does Minimum Wage Increase Labor Productivity? Evidence from Piece Rate Workers. *Journal of Labor Economics*, 40(2), 325–359. <https://doi.org/10.1086/716347>
- Kuypers, S., Marx, I., Kuypers, S., & Marx, I. (2021). *Poverty in the EU Using Augmented Measures of Financial Resources : The Role of Assets and Debt Poverty in the EU using augmented measures of financial resources : the role of assets and debt*. 41.
- Kuznets, S. (1955). Economic Growth and Income Inequality. *American Economic Review*, 1–28.
- Lemos, S. (2008). A survey of the effects of the minimum wage on prices. *Journal of Economic Surveys*, 22(1), 187–212. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6419.2007.00532.x>
- Muhamadiyevich, J. A., & Akhmedjanovich, J. A. (2022). Land Resources In Central Asia As A Social Factor. *International Scientific Research Journal*, 3(2), 419–424.
- Nguyen, H. H. (2020). Impact of foreign direct investment and international trade on economic growth: Empirical Study in Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(3), 323–331. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no3.323>
- Ngwakwe, C. C., & Iqbal, B. A. (2021). *Social Financial Grant and Poverty Alleviation in South Africa*. 17(2), 202–215.
- Nursini, N. (2020). Micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and poverty reduction: empirical evidence from Indonesia. *Development Studies Research*, 7(1), 153–166. <https://doi.org/10.1080/21665095.2020.1823238>
- Olken, B. A. (2019). Designing Anti-Poverty Programs in Emerging Economies in the 21st Century: Lessons from Indonesia for the World. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 55(3), 319–339. <https://doi.org/10.1080/00074918.2019.1690411>
- Omar, M. A., & Inaba, K. (2020). Does financial inclusion reduce poverty and income inequality in developing countries? A panel data analysis. *Journal of Economic Structures*, 9(1). <https://doi.org/10.1186/s40008-020-00214-4>

- Pestaria, A., Kamaludin, K., Husaini, H., & Fadli, F. (2022). The Mediating Role of Age Productivity on Human Resources Development, Health Infrastructure, and Poverty Level. *International Review of Management and Marketing*, 12(1), 11–18. <https://doi.org/10.32479/irmm.12539>
- Rungani, E. C., & Potgieter, M. (2018). The impact of financial support on the success of small , medium and micro enterprises in the Eastern Cape province. *Independent Research Journal in The Management Science*, 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.4102/ac.v18i1.591>
- Sabia, J. J., Burkhauser, R. V., & Hansen, B. (2012). Are the effects of minimum wage increases always small? New evidence from a case study of New York State. *Industrial and Labor Relations Review*, 65(2), 350–376. <https://doi.org/10.1177/001979391206500207>
- Samuelson, A. Paul dan Nordhaus, D. W. (2013). *Makro Ekonomi*. Erlangga.
- Sánchez-Rodríguez, Á., Rodríguez-Bailón, R., & Willis, G. B. (2022). Economic inequality affects perceived normative values. *Group Processes and Intergroup Relations*, 25(1), 211–226. <https://doi.org/10.1177/1368430220968141>
- Schmitt, J. (2013). Why Does the Minimum Wage Have No Discernible Effect on Employment? *Center for Economic and Policy Research, February*, 1–28.
- Seidu, R. D., Young, B. E., Robinson, H., & Ryan, M. (2020). The impact of infrastructure investment on economic growth in the United Kingdom. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 4(2), 217. <https://doi.org/10.24294/jipd.v4i2.1206>
- Sen, A. K. (1997). From Income Inequality to Economic Inequality. *Southern Economic Journal*, 64(2), 384–401.
- Sherk, J. (2007). Raising the Miniu Wage Will Not Reduce Poverty. *The Heritage Foundation*, 8 Januari(1994), 1–3.
- Singh, A. (2022). Judicious and optimal use of water and land resources for long-term agricultural sustainability. *Resources, Conservation and Recycling Advances*, 13, 200067. <https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2022.200067>
- Sukatrilaksana, L. (2003). the Effect of Minimum Wages on Employment in Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 5(3), 74–121. <https://doi.org/10.21098/bemp.v5i3.314>
- Suryahadi, A., & Al Izzati, R. (2018). Cards for the poor and funds for Villages: Jokowi’s initiatives to reduce poverty and inequality. *Journal of Southeast Asian Economies*, 35(2), 200–222. <https://doi.org/10.1355/ae35-2f>
- Vera, K., Adi, S., & Hudi, A. (2022). Implications of Foreign Investment on Economic Development Growth Post-Job Creation Act. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(1), 146–155.

- Wang, Y., & Ding, S. (2021). Open Access Achievements , experiences and challenges of the battle against poverty in China ’ s ethnic minority areas : focusing on the “ three areas and three prefectures .” *International Journal of Anthropology and Ethnology*, 1–26. <https://doi.org/10.1186/s41257-021-00059-0>
- Xiao, H., Zheng, X., & Xie, L. (2022). Promoting pro-poor growth through infrastructure investment: Evidence from the Targeted Poverty Alleviation program in China. *China Economic Review*, 71(November 2020). <https://doi.org/10.1016/j.chieco.2021.101729>
- Ximena V, D. C., Ha, N., & Liang Choon, W. (2015). Do minimum wages affect employment? Evidence from the manufacturing sector in Indonesia. *IZA Journal of Labor and Development*, 4(1). <https://doi.org/10.1186/s40175-015-0040-8>
- Yu, W., Yaseen, M., Wang, Y., Xu, S., Liu, J., Gao, L., & Li, P. (2017). The Impact of Poverty Alleviation Policy on Urban Household Demand. *World Journal of Engineering and Technology*, 05(02), 40–46. <https://doi.org/10.4236/wjet.2017.52b005>